

2

Kemiskinan dan Feminisasi Kemiskinan

2.1. Permasalahan Pembangunan dan Kemiskinan Perempuan di Perkotaan

Saat ini, pembangunan di negara-negara berkembang dan bahkan di negara-negara maju, bukan lagi hanya meningkatkan pendapatan nasional, atau hanya semata-mata menambah produksi barang-barang dan jasa-jasa. Pembangunan mengandung unsur hakiki, yaitu membangun manusia jasmaniah dan rohaniah serta merubah nasib manusia agar dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Salim *dalam* Soetarjono 1985). Menurut Teune (1988:39), pembangunan merupakan suatu proses dalam keadaan suatu sistem. Di dalam proses ini, pembangunan tidak hanya berhubungan dengan sistem pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga berhubungan dengan sistem perlindungan lingkungan hidup. Pembangunan menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat di dalam ekosistem bumi ini.

Keberlanjutan lingkungan bermaksud mengubah kegiatan manusiawi agar tidak lagi mengancam sumber daya alam dan sistem ekologis secara mendasar, dimana keduanya sebagai tempat bergantungnya pembangunan ekonomi, kesehatan manusia dan kesejahteraan sosial. Bagi masyarakat Indonesia, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu kegiatan manusia yang harus diupayakan secara sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan

hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Namun, pada kenyataannya, pembangunan yang merupakan hasil interaksi dari subsistem sosial dan ekonomi, subsistem lingkungan buatan serta subsistem alam dalam suatu ekosistem perkotaan, melahirkan kondisi yang ambigu dalam suatu masyarakat. Disatu pihak pembangunan menjadi kebanggaan masyarakat karena menghasilkan pertumbuhan ekonomi, sedang di pihak lain merupakan beban kehidupan bagi kelompok masyarakat tertentu (seperti: menambah beban kehidupan masyarakat miskin kota).

Kenyataan ini sedang terjadi pada masyarakat kota seperti Kota Jakarta. Di satu sisi, menurut laporan BPS Provinsi DKI Jakarta (2008), bahwa pembangunan kota Jakarta, telah meningkatkan kualitas hidup penduduk kota Jakarta. Ini dinyatakan dengan peningkatan beberapa parameter penting, seperti: (i) jumlah penduduk miskin kota Jakarta turun dari 405,7 ribu (4,48 persen) pada bulan Maret 2007 menjadi sebesar 379,6 ribu (4,29 persen) pada bulan Maret 2008 atau turun sebesar 26,1 ribu (0,19 persen); (ii) inflasi yang relatif rendah pada tahun 2007 yaitu sebesar 6,04 persen; (iii) UMP DKI Jakarta yang terus meningkat selama tahun 2004-2008 dari 671.550 (2004) menjadi 972.645 rupiah (2008); (iv) meningkatnya tingkat ketepatan pembahagian raskin (beras miskin) kepada rumahtangga miskin, dan (v) menurunnya tingkat pengangguran.

Namun, di sisi lain, konsep pembangunan Kota Jakarta, telah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan kota Jakarta, yaitu: (i) ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Jakarta sebagai penetral udara semakin sulit diperoleh (Harian Republika, 3 Juli 2003); (ii) tercemarnya air tanah dengan bakteri ecoli (Gatra online Jakarta, 30 Juli 2004 tentang Kondisi Air Tanah Jakarta Makin Menurun); (iii) standar mutu udara telah berada di atas ambang batas yang dapat ditolerir oleh kesehatan manusia (Suara Pembaharuan 15 Oktober 2002); dan (iv) daya dukung lahan (0,01) dan daya dukung air (0,08) wilayah DKI Jakarta telah terlampaui (Rakernas AMDAL 2008).

Kenyataan yang lain, bahwa pembangunan kota Jakarta masih belum dapat menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat kota. Justru, saat ini, penurunan kualitas hidup kelompok masyarakat miskin kota Jakarta sedang terjadi. Ini diperlihatkan melalui penggusuran

lahan hunian masyarakat miskin kota dalam rangka penataan kota Jakarta.

Dalam RTRW Jakarta 2010, dialokasikan lahan untuk permukiman seluas 37,21 % dari luas Kota Jakarta atau 25.477,68 ha. Padahal pada tahun 2001, luas permukiman di Kota Jakarta adalah 43.475,09 ha (Jakarta dalam angka 2001). Akibatnya, akan direncanakan untuk terjadinya pengurangan lahan permukiman. Jika diasumsikan yang digusur adalah permukiman dengan kepadatan 300 orang per hektar (permukiman kumuh), maka yang harus digusur adalah 5,4 juta orang dari masyarakat strata bawah. Ini berarti penataan kota justru menggusur masyarakat miskin kota, yang akhirnya masyarakat miskin kota akan bertambah miskin. Hal ini di dukung oleh data-data yang diperoleh INFID (2005) bahwa upaya-upaya penggusuran masyarakat miskin telah dilakukan pemerintah DKI Jakarta sepanjang tahun 2001-2003.

Padahal, tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pembasmian kemiskinan.

All States and all people shall cooperate in the essential task of eradicating poverty as an indispensable requirement for sustainable development, in order to decrease the disparities in standards of living and better meet the needs of the majority of the people of the world. (Principle 5 - Rio Declaration on Environment and Development. 1992).

Di mana, penghapusan kemiskinan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, perlindungan lingkungan dan keadilan sosial memerlukan partisipasi penuh dan setara antara perempuan dan laki-laki. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada manusia, yaitu: pada perempuan dan laki-laki, sebagai agen dan penerima manfaat pembangunan.

Namun, pada kenyataan penerimaan manfaat pembangunan tak merata bagi seluruh masyarakat perkotaan. Pembangunan kota saat ini, cenderung menambahkan beban hidup bagi masyarakat miskin perkotaan. Perempuan miskin lebih berat menderita dibandingkan dengan laki-laki miskin.

Dari data *United Nation* (1997) dikemukakan bahwa situasi kemiskinan yang paling hebat terjadi di negara-negara berkembang, di mana terdapat sekitar 1,3 miliar warga dunia yang miskin, 70 % di antaranya adalah kaum perempuan. Kondisi ini didukung data yang dikemukakan ILO (2004), yaitu: terdapat 550 juta pekerja miskin di dunia, atau orang yang tidak mampu mengangkat dirinya dan keluarga

mereka berpenghasilan di atas US\$1 per hari. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 330 juta atau 60 persen adalah perempuan.

Kemiskinan telah menyebabkan perempuan menanggung beban yang lebih berat dibanding laki-laki. Di mana, selain memberikan 66% dari jam kerjanya, perempuan miskin hanya mendapatkan 10% dari hasil kerjanya (Tjokrowinoto 1996). Jam kerja perempuan sekitar 30-50 persen lebih panjang dari laki-laki pada usia yang sama dan untuk pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar, dibandingkan dengan laki-laki pada usia yang sama (Cahyono 2005).

Ternyata kemiskinan tidak lepas hanya disebabkan ketidakadilan menanggung beban kekurangan ekonomi bagi perempuan. Tetapi juga terjadi penindasan, perampasan hak, yang melahirkan penderitaan, kesedihan, dan luka yang mendalam. Ditemukan bahwa satu dari enam perempuan mengalami perlakuan kejam, dan kekerasan, ini banyak terjadi di negara miskin (Suara Pembaharuan, 2 Desember 2005). Di Kota Jakarta, tepatnya di kawasan Jatinegara, terjadi perampasan hak hidup bagi anak-anak oleh orang tua mereka, di mana 31 persen anak perempuan dari keluarga miskin dijual oleh orangtuanya akibat tekanan kemiskinan (*Institute of Ecosoc Rights* 2008). Kajian yang dilakukan ILO-IPEC pada tahun 2003 memperkirakan jumlah pekerja seks komersial di bawah 18 tahun sekitar 1.244 anak di Jakarta (*TEMPO Interaktif*, 12 Juni 2003).

Sistem dalam perkotaanpun tidak memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dapat mengaktualisasikan perannya, terutama dalam meningkatkan taraf ekonomi. Di perkotaan, angka pengangguran perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada satu sisi, hal ini menunjukkan kemajuan karena semakin banyak perempuan yang aktif secara ekonomi dengan mencari pekerjaan. Tetapi pada sisi lain, kondisi ini menunjukkan bahwa lowongan pekerjaan umumnya lebih terbuka lebar bagi laki-laki, karena sifat pekerjaan yang sesuai untuk perempuan umumnya lebih spesifik dan tingkat pendidikan perempuan umumnya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Secara nasional penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pekerja dibayar sebesar 27,29% dan didominasi oleh laki-laki (28,22% berbanding 25,57%) (BPS 2006).

Selain itu, perempuan tak memiliki kesempatan seluas kaum laki-laki, kondisi kehidupan perempuan tidak pernah dimasukkan sebagai "indikator" pembangunan (Shiva 2005:84). Shiva juga mengemukakan di dalam bukunya Ecofeminisme bahwa kehidupan

perempuan sama seperti lingkungan alam. Hal ini terlihat dari pengabaian dua persoalan yang tidak terlihat. Pertama, kontribusi alam dan perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi pasar diabaikan. Teori ekonomi yang dominan menempatkan tugas mencari nafkah dan kerja domestik oleh perempuan sebagai pekerjaan yang tidak bernilai dan oleh karena itu secara statistik tidak terlihat. Kedua, dampak negatif dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terhadap perempuan dan lingkungan tidak dijadikan pertimbangan. Padahal, perempuan mempunyai peran penting dalam mengelola lingkungan hidup dan pembangunan, partisipasi penuh perempuan merupakan hal yang mendasar untuk mencapai keberlanjutan pembangunan.

Women have a vital role in environmental management and development. Their full participation is therefore essential to achieve sustainable development.
(Principle 20 - Rio Declaration on Environment and Development - The United Nations Conference on Environment and Development, 1992).

Hasil penelitian yang dilaporkan oleh Lengerman & Brantley (2003:404-405) tentang situasi dan kondisi perempuan akibat pembangunan suatu masyarakat telah menghasilkan penemuan-penemuan yang memberikan gambaran kehidupan perempuan. Di mana gambaran tersebut merupakan representasi kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang mendasar.

Pembasmian atau penghapusan kemiskinan tidak akan terpenuhi hanya pada program-program anti kemiskinan. Tanpa adanya keikutsertaan dan perubahan struktur ekonomi dalam rangka memastikan akses bagi semua perempuan ke sumber daya, peluang dan pelayanan publik tidak diberikan.

The eradication of poverty cannot be accomplished through anti-poverty programmes alone but will require democratic participation and changes in economic structures in order to ensure access for all women to resources, opportunities and public services.
(<http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/poverty.htm>)

Dalam pembasmian kemiskinan, dua aspek lainnya yang merupakan pilar utama, adalah: keadilan sosial dan kesetaraan.

"Eradication of poverty based on sustained economic growth, social development, environmental protection and social justice requires the involvement of women in economic and social development, equal opportunities and the full and equal participation of women and men as agents and beneficiaries of people-centred sustainable development". (Principle 16. Beijing Declaration, Action for Equality, Development and Peace. 1995)

2.1. Paradigma Kemiskinan

Kemiskinan tidak semata-mata dibatasi pada masalah pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, kerentanan terhadap guncangan, partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, dan banyak aspek kehidupan lainnya. Mangunwijaya berpendapat bahwa kemiskinan timbul karena struktur, sedangkan Satjipto Rahardjo berpendapat sebaliknya, struktur bukan satu-satunya faktor dalam hubungannya dengan kemiskinan (Rahmat 1999:5).

Menurut catatan Rahmat, kaum liberal memandang bahwa manusia sebagai manusia yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan, di mana budaya kemiskinan hanyalah semacam *realistic and situational adaptation* pada lingkungan yang pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang sempit. Bila kondisi sosial ekonomi diperbaiki dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama, maka "budaya kemiskinan" segera pula ditinggalkan. Jadi orang miskin tidak berbeda dengan orang kaya, mereka hanya mempunyai posisi yang tidak menguntungkan. Menurut Rahmat 1999:6), kemiskinan disebabkan karena sistem ekonomi dan politik memaksakan begitu, orang menjadi miskin karena dieksploitasi.

Konsep kemiskinan menurut Bappenas (2002) adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Menurut Chamber yang dikutip dalam Suryawati (2005) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Sehingga, menurut UNDP (2000), kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi seseorang (individu) yang tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan tidak memiliki kemampuan dasar manusiawi untuk menunjang keberlanjutan hidup. Hak-hak dasar

terdiri adalah hak untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.

Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hal ini didukung oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan (2005), yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran hak dan tidak terpenuhinya hak. Kemiskinan juga dipandang sebagai proses perampasan atas daya rakyat miskin. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga apabila tidak terpenuhinya satu hak maka dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya (Komite Penanggulangan Kemiskinan 2005: 9).

Menurut Nasikun yang dikutip *dalam* (Suryawati 2005), bahwa hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Nasikun *dalam* Suryawati 2005).

Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan (Suparlan *dalam* Masjkuri 2007). Di mana standar kehidupan yang rendah didorong oleh suatu kondisi atau keadaan di mana individunya mengalami keterbatasan pilihan dan kemampuan (*lack of choice and capability*) (Amartya Sen yang dikutip *dalam* Sari 2003).

Menurut Friedman (1992:67), kemiskinan merupakan kesenjangan (ketiadaan) akses terhadap unsur-unsur kekuasaan sosial (*social power*), yang mencakup aspek-aspek, yaitu:

- a. Ketiadaan tempat tinggal, atau ruang untuk tinggal (*defensible life space*), termasuk di dalamnya lingkungan fisik dimana keluarga memasak, makan, tidur dan menyimpan benda-benda pribadi
- b. Ketiadaan waktu (*surplus time*), jumlah waktu yang tersedia untuk dapat memperoleh kebutuhan subsistensinya
- c. Pengetahuan dan ketrampilan (*knowledge and skills*), termasuk di dalamnya tingkat pendidikan yang rendah dan pelatihan ketrampilan tertentu untuk bekerja
- d. Informasi tepat guna (*appropriate information*), termasuk di dalamnya informasi mengenai segala aspek kehidupan juga kesempatan ekonomi, seperti metode produksi yang baik, metode sanitasi yang baik, metode pemeliharaan balita, ketersediaan akses terhadap pelayanan umum, dan lain sebagainya.
- e. Organisasi sosial (*social organization*), baik organisasi formal maupun informal.
- f. Jaringan sosial (*social networks*), berupa akses untuk melakukan kegiatan kerjasama (*reciprocity*) bagi munculnya tindakan pribadi yang mandiri (*self-reliant action*). Keluarga yang mempunyai akses jaringan kerjasama horisontal yang luas antar sesama keluarga yang lain atau dengan lembaga lain akan mempunyai ruang gerak kegiatan yang lebih luas dibanding dengan yang tidak memilikinya.
- g. Alat kerja dan kehidupan (*instruments of work and livelihood*), tercakup di dalamnya alat-alat produksi bagi keluarga.
- h. Sumberdaya keuangan (*financial resources*), termasuk di dalamnya tingkat pendapatan keluarga dan akses terhadap sumber kredit baik formal maupun informal.

Namun, menurut Soetrisno (1997:16-17) bahwa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat sangat berbeda, tergantung dari budaya yang hidup pada masyarakat. Di mana kemiskinan pada suatu masyarakat dikaitkan dengan akibat pembangunan yang dianut dalam suatu negara, di mana model pembangunan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menimbulkan kemiskinan pada kelompok manusia dalam negara yang menganut model tersebut.

Pandangan tersebut sesuai dengan pernyataan Muhammad Yunus, seorang ahli ekonomi yang juga penerima hadiah nobel perdamaian 2006, menyatakan bahwa: "dunia kemiskinan tidak dibikin

oleh rakyat miskin". Menurutnya, kemiskinan diciptakan dan dilestarikan oleh sistem sosial-ekonomi yang kita rancang sendiri; pranata-pranata dan konsep-konsep yang menyusun sistem itu; kebijakan-kebijakan yang kita tetapkan. Selanjutnya menurut Yunus (2007) bahwa kemiskinan tercipta karena kerangka teoritis dibangun berdasarkan asumsi yang merendahkan kapasitas manusia, dengan merancang konsep-konsep terlampau sempit (seperti konsep bisnis, kelayakan kredit, kewirausahaan, lapangan kerja) atau mengembangkan lembaga-lembaga yang belum matang (seperti lembaga-lembaga keuangan yang mengikutsertakan kaum miskin).

Akhirnya Muhammad Yunus (2007:267-268) menyimpulkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh kegagalan pada tataran konseptual, dan bukan kurangnya kapabilitas di pihak rakyat, sehingga orang miskin itu ibarat pohon bonsai.

"Orang miskin itu orang bonsai. Tak ada salah dengan bibitnya. Sederhana saja, masyarakat tak pernah memberi mereka lahan untuk bertumbuh kembang. Yang diperlukan untuk membuat masyarakat miskin keluar dari kemiskinan adalah menciptakan lingkungan yang memberdayakan mereka. Bagi kaum miskin bisa melejitkan energi dan kreatifitas mereka, kemiskinan akan lenyap dengan cepat" (Yunus 2007:269).

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh kaum radikal bahwa kemiskinan disebabkan oleh peranan struktur ekonomi, politik dan sosial, di mana kemiskinan disebabkan karena sistem ekonomi dan politik memaksakan begitu, dan orang menjadi miskin karena dieksploitasi (Rahmat 1999:6). Menurut kaum liberal yang dikutip dalam Rahmat (1999:6) bahwa kemiskinan adalah budaya, di mana semacam *realistic and situational adaptation* pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang sempit. Manusia sebagai manusia yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dan apabila kondisi sosial ekonomi diperbaiki dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama, maka "budaya kemiskinan" segera pula ditinggalkan.

Oleh karena itu pula, Muhammad Yunus (2007) sangat meyakini bahwa kemiskinan sangat mungkin dihapuskan dari dunia, karena kemiskinan bukan sifat alami manusia. Dari pernyataan Muhammad Yunus, dapat disimpulkan kondisi kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh diri masyarakat itu sendiri melainkan kemiskinan merupakan suatu paksaan bagi mereka (orang miskin).

Seperti yang diungkapkan Kadir yang dikutip *dalam* Masjkuri (2007) bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Hal ini disebabkan terbatasnya modal yang mereka miliki dan rendahnya pendapatan mereka. Sehingga akan mengakibatkan terbatasnya kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

2.1.1. Bentuk-bentuk Kemiskinan

Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu proses dalam kehidupan sosial manusia, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Selain disebabkan oleh beberapa faktor, kemiskinan di Indonesia memiliki bentuk yang khas. Menurut Nasikun dalam Suryawati (2005), kemiskinan di Indonesia, dapat dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, yaitu: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relative, yaitu: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural, yaitu: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan struktural, yaitu: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburinya kemiskinan

Menurut Mas' oed (1997) kemiskinan di Indonesia, juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan, yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.

- b. Kemiskinan buatan, yaitu kemiskinan yang lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Menurut Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan RI (2001) bahwa kemiskinan di Indonesia lebih disebabkan oleh 9 faktor, yaitu:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan).
- b. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- c. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- d. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
- f. Tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- g. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial/anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpendek.

Dari kesembilan dimensi tersebut dapat diidentifikasi 3 kondisi utama yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, yaitu: ketidakmampuan, tidak adanya akses, dan kerentanan terhadap guncangan. Dua sebab pertama tersebut bersifat internal yaitu berasal dari masyarakat itu sendiri, sedangkan sebab ketiga bersifat eksternal artinya berasal dari faktor luar masyarakat miskin.

2.1.2. Pengukuran Kondisi Kemiskinan di Indonesia

Di Indonesia, terdapat beberapa cara untuk menentukan kondisi kemiskinan dalam masyarakat, yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintahan negara Republik Indonesia serta badan dunia. Pendekatan inilah yang akan menjadi dasar pembuatan program penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Pendekatan-pendekatan tersebut

telah dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah, seperti BPS, BKKBN, serta pendekatan badan dunia, seperti UNDP dan Bank Dunia.

Pendekatan pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS (penentuan garis kemiskinan) adalah BPS (2005): (i) konsumsi kalori per kapita per hari, atau konsumsi berupa makanan yang kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah) dan (ii) pengeluaran per kapita per bulan.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan BKKBN menggunakan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga. BKKBN membagi dalam lima tahapan, yaitu: Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus). Kriteria keluarga miskin adalah: Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (BPS 2005).

Tabel 1. Lima Tahapan Kondisi Keluarga Para Sejahtera

Lima Tahapan Keluarga Pra Sejahtera	Kondisi Keluarga
Keluarga Para Sejahtera (Para-KS)	<ol style="list-style-type: none"> 1) keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 2) belum mampu memenuhi kebutuhan makan minimal dua kali sehari. 3) Memiliki pakaian yang sama untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian. 4) bagian lantai rumahnya dari tanah 5) belum mampu untuk berobat di sarana kesehatan
Keluarga Sejahtera Tahap I	<ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama 2) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih. 3) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah/ pergi/bekerja /sekolah. 4) Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah. 5) Anak sakit ataupun pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB dibawa kesarana kesehatan.

Lanjutan tabel 1

Lima Tahapan Keluarga Pra Sejahtera	Kondisi Keluarga
Keluarga Sejahtera Tahap II	<ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur 2) Paling kurang sekali seminggu lauk daging/ikan/telur 3) Setahun terakhir anggota keluarga menerima satu stel pakaian baru 4) Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni 5) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas 6) Ada anggota keluarga umur 15 tahun keatas berpenghasilan tetap. 7) Anggota keluarga umur 10-60 tahun, bisa baca tulis latin 8) Anak umur 7-15 tahun, bersekolah 9) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi
Keluarga Sejahtera Tahap III	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung 3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi 4) Keluarga sering ikut dalam kegiatan mesyarakat dilingkungan tempat tinggal. 5) 5 Keluarga rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan. 6) Keluarga memperoleh berita dari surat kabar/majalah/TV/radio. 7) Anggota keluarga menggunakan sarana transportasi setempat.
Keluarga Sejahtera Tahap III Plus	<ol style="list-style-type: none"> 8) Keluarga secara teratur memberikan sumbangan 9) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan / institusi Masyarakat

Pendekatan pengukuran kemiskinan yang dilakukan badan dunia, seperti UNDP yang dirangkum di dalam *UNDP Poverty Report 2000*, dilihat dari dua aspek, yaitu: miskin pendapatan dan miskin akan kemampuan manusiawi.

- a. Miskin pendapatan atau kategori miskin sekali adalah : tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, umumnya terhadap kebutuhan dasar akan kalori atau kemiskinan absolut. Kategori miskin keseluruhan adalah tidak memiliki pendapatan umumnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bukan makanan, seperti pakaian, rumah, juga kebutuhan pokok makanan atau kemiskinan relatif.
- b. Miskin kemampuan manusia, adalah tidak memiliki kemampuan dasar manusiawi, seperti butahuruf, gizi buruk, usia harapan hidup yang pendek, buruknya kesehatan ibu, rentan terhadap penyakit yang mudah disembuhkan. Secara tidak langsung miskin kemampuan manusia adalah kekurangan akses untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan hidup, pelayanan dan sarana infrastruktur, sanitasi, pendidikan, komunikasi, air minum, yang umumnya untuk menunjang keberlanjutan kemampuan dasar manusia.

Dalam pengukuran kemiskinan, Bank Dunia memfokuskan pada tiga aspek pengukuran kemiskinan, yaitu:

- a. Kemiskinan itu sendiri, yang didefinisikan sebagai ketidakcukupan sumberdaya rumah tangga atau individu atau kesanggupan memenuhi kebutuhan hari ini;
- b. Ketidaksetaraan dalam pendistribusian penghasilan, konsumsi atau benda-benda lain lintas penduduk; dan
- c. Keringkhan, yang didefinisikan sebagai kemungkinan atau risiko hari ini untuk menjadi miskin atau jatuh ke dalam kondisi yang sangat miskin untuk masa yang akan datang (World Bank 2007).

Menurut perhitungan World Bank bahwa kemiskinan parah, apabila hidup dengan penghasilan kurang dari US\$ 1 per hari, dan kemiskinan sedang hidup dengan penghasilan US\$ 2 per hari.

2.2. Kemiskinan Perkotaan

Kemiskinan dan kesejangan merupakan suatu hal yang mencakup keterbelakangan (*underdevelopment*) (Usman 2004:33). Kemiskinan biasanya termanifestasi dalam kondisi (keadaan) kehidupan masyarakatnya. Kondisi kemiskinan perkotaan berbeda dengan di pedesaan. Kemiskinan di desa terjadi akibat involusi atau pengadaan pekerjaan yang sama oleh jumlah penduduk yang lebih

banyak terhadap penggarapan tanah yang tetap dan terbatas luasnya, sehingga terjadi “penyempitan” tanah garapan (Susanto 1984:104).

Sedangkan kemiskinan di perkotaan, menurut Prof. Astrid Susanto terjadi akibat adanya arus surplus negatif dari kota kembali ke desa. Masyarakat miskin kota menurut Baharoglu & Kessides (2001), terdiri dari kelompok-kelompok dengan kebutuhan yang berbeda dan tingkat serta jenis kerentanan yang berbeda pula. Menurut catatan BPS yang dikutip dalam Usman (2004:36) bahwa jumlah penduduk miskin di desa biasanya lebih besar dari pada di kota. Oleh karena itu pula, kemiskinan di desa berkaitan dengan kemiskinan di kota. Menurut laporan Worldbank (2003), kemiskinan di perkotaan ditandai oleh tingginya pengangguran yang diikuti dengan peningkatan tekanan sosial terhadap masyarakat kota, yang selanjutnya mengakibatkan tingginya kerentanan terhadap kemiskinan. Akibat kemiskinan, di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan, memiliki hak terbatas terhadap tanah, rumah, infrastruktur dan pelayanan dasar, kesempatan kerja dan mendapatkan pinjaman, pemberdayaan dan partisipasi, rasa aman dan keadilan Worldbank (2003:40).

Meskipun definisi kondisi kemiskinan perkotaan berbeda-beda di beberapa negara, namun menurut Baker (2008), gejala-gejala atau fenomena kemiskinannya sama. Gejala-gejala kemiskinan tersebut, adalah: (i) terbatasnya akses mendapatkan pekerjaan dan pendapatan, (ii) tidak cukup dan tidak amannya kondisi tempat tinggal, (iii) miskin prasarana dan pelayanan; (iv) rentan akan resiko seperti bencana alam, bahaya lingkungan dan resiko kesehatan khususnya yang tinggal di perkampungan kumuh; (v) persoalan ruang yang menghalangi mobilitas dan angkutan dan (vi) ketidaksetaraan.

2.2.1. Terbatasnya Akses Pekerjaan dan Pendapatan

Masyarakat miskin perkotaan menghadapi tantangan rendahnya ketrampilan, gaji rendah, pengangguran dan pengangguran tak kentara, kekurangan asuransi sosial dan kondisi bekerja yang tak memuaskan (Baker 2008). Di beberapa negara, lokasi ruang perkampungan kumuh, yang tidak cukup prasarana, memberikan stigma negatif bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pekerjaan. Ketergantungan terhadap ekonomi uang membuat masyarakat miskin perkotaan sangat ringkih terhadap guncangan.

2.2.2. Tempat Tinggal dan Keamanan

Kondisi kehidupan masyarakat miskin kota menyedihkan. Penduduk perkotaan miskin menghadapi banyak tantangan sama di kehidupan sehari-hari sebagai penduduk miskin pedesaan, dengan beban tambahan hidup penuh-sesak dan sering hidup dalam kondisi tanpa sanitasi. Meskipun tidak semua masyarakat miskin kota, tinggal di perkampungan kumuh. Namun, diperkirakan ada sekitar sepertiga penduduk miskin perkotaan atau hampir satu milyar orang yang tinggal di perkampungan kumuh dan lebih dari 90% berlokasi di kota-kota negara berkembang (UN-HABITAT 2006/7).

2.2.3. Prasarana dan Pelayanan

Masalah akses akan prasarana dan pelayanan yang benar-benar akut bagi masyarakat miskin perkotaan. Biasanya akses lebih tinggi di area perkotaan dari pada di pedesaan, tapi kini di perkotaan akses tersebut sangat rendah sekali, kualitas tidak baik, dan tak dapat diperoleh masyarakat miskin. Bahkan masyarakat di perkampungan kumuh harus menyediakan biaya tambahan untuk mendapatkan air bersih. Seperti masyarakat miskin di kecamatan Tambora dan Cengkareng, Jakarta Barat, serta Kecamatan Kemayoran dan Senen, Jakarta Pusat. Meski sebagian besar penduduk di kecamatan tersebut mempunyai rumah sendiri, tetapi banyak yang tidak terjangkau fasilitas air bersih dan tidak mempunyai sanitasi yang memadai (Kompas, Kamis, 21 April 2005).

Ketika sebagian besar masyarakat miskin perkotaan mampu menanggung biaya pembangunan WC umum yang murah, tetapi sekali lagi tidak adanya hak kepemilikan atau hak sewa lahan pemukiman menjadi penghalang. Juga, kebanyakan dari mereka tidak menyadari adanya pilihan WC umum berbiaya rendah, baik di pedesaan maupun perkotaan (Mukherjee 2006).

2.2.4. Resiko, Lokasi, Mobilitas dan Angkutan

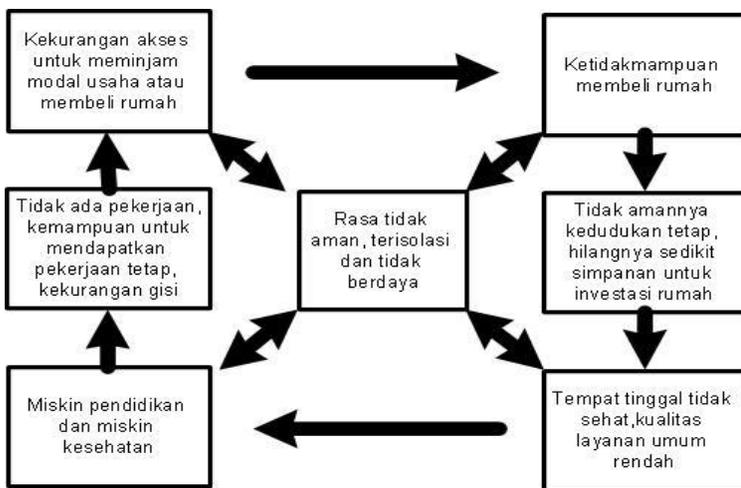
Lokasi permukiman masyarakat miskin di kota-kota, umumnya memiliki resiko tinggi terhadap bencana alam banjir, tanah longsor dan gempa bumi (Fay *et al* 2003). Pola lokasi ruang perkampungan berpenghasilan rendah sangat berubah-ubah dari kota ke kota, meskipun umumnya cenderung jelas yang utama dari lahan tempat tinggal masyarakat miskin adalah suatu yang tidak menyenangkan bagi yang lain. Ini diakibatkan oleh permukiman yang tidak teratur (lintang pukang), keterbatasan lahan dan rumah, tidak efisiennya pasar lahan,

dan buruknya sistem angkutan umum. Sedangkan beberapa yang hidup di lokasi pemukiman penghasilan rendah dengan mutu lebih miskin dalam kota, dekat dengan kesempatan pekerjaan dan pasar. Namun, banyak yang hidup di wilayah peri-perkotaan, di mana akses ke pasar kerja lebih sulit. Menurut hasil pengamatan Worldbank (2002), bahwa lokasi, pola angkutan perkotaan miskin juga menjelaskan sesuatu yang kompleks antara perdagangan dan lokasi kediaman serta jarak tempuh dan alat angkut.

2.2.5. Ketidaksetaraan

Ketidaksetaraan dalam akses mendapatkan pelayanan, perumahan, tanah, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan pekerjaan bisa mempunyai konsekuensi sosio-ekonomi, lingkungan dan politik (Baker 2008). Di banyak negara, gini koefisien perkotaan cukup tinggi dari pada di daerah pedesaan di mana tingkat hidup lebih homogen. Ketidaksetaraan juga kelihatannya bertambah dengan ukuran kota, meskipun ini tidak diuji secara luas.

Menurut Baker (2008) bahwa perbedaan yang tinggi sangat jelas dalam kekayaan, pelayanan dan kesempatan, yang bisa menimbulkan frustrasi, ketegangan dan pengertian “tidak diikutkannya si miskin”.



Gambar 9. Dampak kumulatif kemiskinan kota (Diadopsi dari Worldbank 2001)

Menurut pengamatan yang dilakukan oleh Worldbank (2006) bahwa, dimensi “tidak disertakan” dikelompokkan ke dalam tiga kategori: (i) tidak disertakan ekonomi untuk akses merata dalam ekonomi/keuangan, sosial, manusia dan aset sumber alam; (ii) tidak disertakan dari akses sampai pelayanan dasar; (iii) tidak disertakan sosial yang membatasi orang dari mengambil bagian atas hubungan adil dalam kehidupan sosial lokal dan nasional.

Lima dimensi kemiskinan perkotaan (Worldbank 2000) adalah: (i) kemiskinan pendapatan; (ii) kemiskinan kesehatan; (iii) kemiskinan pendidikan; (iv) kemiskinan keamanan dan hak pribadi dan; (v) ketidakberdayaan. Di mana kelima dimensi ini akan setiap hari menjadi tantangan hidup masyarakat miskin kota. Setiap saat kelima dimensi ini akan selalu saling mempengaruhi satu dengan yang lain serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan perkotaan. Saling mempengaruhinya dimensi-dimensi kemiskinan kota, akan memberikan dampak, terutama pada setiap individu-individu dari bagian masyarakat tersebut. Individu-individu miskin akan menerima akumulasi dari setiap dimensi kemiskinan yang selanjutnya menderita rasa tidak aman, terisolasi dan rasa tidak berdaya (Gambar 2).

Kondisi ini akan menghambat dirinya sendiri dan bahkan masyarakat untuk dapat dikeluarkan dari kondisi miskin tersebut. Laporan Worldbank (2003:35) bahwa wajah kemiskinan perkotaan di Indonesia adalah kondisi jutaan penduduk yang tinggal di daerah kumuh di Jakarta. Hal ini menurut Worldbank (2003) disebabkan oleh kemiskinan materi karena kurang pemasukan untuk kebutuhan makanan dan permukiman, rentan terhadap keamanan dan kesehatan dan terbatasnya akses terhadap informasi dan pendidikan. Worldbank (2003) juga melaporkan bahwa sumber kemiskinan yang lain, adalah terjadinya rasa ketidakamanan perempuan akibat diskriminasi jender.

2.3. Feminisasi Kemiskinan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian, dapat dijeneralisasikan bahwa kemiskinan lebih banyak di derita oleh perempuan (Todaro 2000:170). Menurut Todaro, bahwa di dunia ketiga terungkap fakta bahwa kaum perempuan beserta anak-anaknya paling menderita kekurangan gizi, paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi dan berbadai bentuk pelayanan sosial lainnya.

Todaro (2000:170) mengemukakan bahwa banyak perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, rendah kapasitas mereka mencetak

pendapatan sendiri, dan terbatas kontrol terhadap pendapatan suami. Sementara itu lanjut Todaro, bahwa perempuan memiliki keterbatasan akses dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak di sektor formal, tunjangan-tunjangan sosial dan program-program penciptaan lapangan pekerjaan yang diciptakan pemerintah. Jadi semakin meningkatnya keterbelakangan perempuan bukan lantaran mereka tidak layak dan tidak mampu berpartisipasi dalam pembangunan, tapi karena perlakuan yang tidak adil, kerja yang mereka lakukan tidak dianggap sebagai kerja yang menghasilkan keuntungan (Shiva 2005:83).

Feminisasi kemiskinan adalah “pertumbuhan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan secara bersama” (Moghadam 2005:7). Menurut kamus Wikipedia, feminisasi kemiskinan didefinisikan sebagai suatu perubahan tingkat kemiskinan yang menyimpang menyerang perempuan atau kepala rumah tangga perempuan. Lebih spesifik lagi, hal itu adalah peningkatan dalam perbedaan tingkat kemiskinan antara perempuan dan laki-laki atau antara perempuan melawan laki-laki dan pasangan kepala rumah tangga-rumah tangga. Dapat berarti juga sebagai peningkatan ketidaksetaraan peran jender.

Namun, menurut Vandana Shiva (2005), bahwa persepsi terhadap kemiskinan yang ada saat ini hanyalah diakibatkan oleh persoalan tiadanya pola-pola konsumsi yang biasanya terjadi di Barat, atau persoalan tiadanya pemasukan kapital yang cukup dan oleh karenanya kemiskinan itu tidak mungkin di atasi hanya dengan kemandirian ekonomi, atau mengatasi kemiskinan yang diakibatkan kerusakan lingkungan lewat pembangunan. Dan menurut Shiva, kesemua itu telah menimbulkan kelangkaan sumberdaya alam tersebut, yang merupakan basis pertahanan ekonomi kaum perempuan, yang mengakibatkan pemiskinan perempuan.

Berdasarkan dokumentasi Ester Boserup *dalam* Shiva (2005:83), ternyata pemiskinan perempuan semakin meningkat ketika diterapkan peraturan kolonial; di mana pembuat aturan tersebut telah sekian ratus tahun menaklukkan dan menempatkan kaum perempuan ke dalam posisi tidak punya keahlian (*skill*), tidak terdidik, mendiskriminasi akses perempuan terhadap tanah, teknologi dan lapangan kerja.

Menurut catatan Shiva (2005:83) bahwa PBB menganggap kemajuan posisi ekonomi kaum perempuan akan mengalir otomatis

seiring terjadinya perluasan dan penyebaran proses pembangunan. Namun, diakhir dekade (pada laporan sepuluh tahunan PBB), justru pembangunan itu sendiri yang menjadi pangkal masalah bagi perempuan. Dan berdasarkan laporan situasi sosial dunia 1997 oleh badan PBB (1997), bahwa dari 1,3 milyar warga dunia yang masuk kategori miskin, 70% nya adalah perempuan.

Pemiskinan perempuan (feminisasi kemiskinan) dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: (i) akses perempuan terhadap pekerjaan; (ii) akses terhadap upah yang sama; (iii) akses pendidikan; dan (iv) beban pekerjaan.

2.3.1. Akses Perempuan Terhadap Pekerjaan

Adanya keterbatasan akses terhadap pasar kerja dan kecenderungan perempuan yang memasuki pasar tenaga kerja jauh lebih kecil dari pada laki-laki, sementara memasuki pasar tenaga kerja. Di Indonesia ada sekitar 85,3% tingkat partisipasi laki-laki untuk semua tingkatan pendidikan dan 46,3% untuk partisipasi kerja perempuan (Noerdin *et al* 2006:8). Akhirnya perempuan lebih banyak berada di sektor informal. Terjadi pula diskriminasi pekerjaan dengan mencantumkan seperti pencantuman kata-kata "penampilan menarik" sampai hal yang bisa menjurus pada pelecehan seksual ketika syarat yang ditetapkan perusahaan adalah harus memakai rok pendek (Kompas 16 September 2002).

Berbagai alasan perusahaan melakukan diskriminasi pekerjaan terhadap perempuan, yaitu: pertama, prasangka pekerjaan tertentu hanya bisa dilakukan laki-laki, atau perempuan hanya cocok melakukan kerja tertentu, kedua, peraturan tentang hak-hak pekerja perempuan, sehingga merekrut pekerja perempuan dianggap "merugikan" perusahaan. Contohnya, aturan tentang cuti, khususnya cuti haid dan cuti melahirkan. Menurut Edi Prijono (Kompas 19 Mei 2007), bahwa peraturan ini positif, karena sangat melindungi pekerja perempuan terkait dengan fungsi reproduksinya. Akan tetapi, dari sudut pandang perusahaan, ketentuan ini membuat pekerja perempuan sangat berpotensi memiliki hari kerja lebih rendah daripada laki-laki, sementara gajinya harus terus diberikan ketika cuti.

2.3.2. Akses Perempuan Terhadap Upah yang Sama

Perempuan mengalami masalah diskriminasi upah. Buruh perempuan di Indonesia menerima upah lebih rendah daripada buruh

laki-laki. Menurut data yang dikemukakan Edy Prijono (Kompas 19 Mei 2007), secara rata-rata keseluruhan buruh perempuan hanya menerima 74 persen dari upah yang diterima buruh laki-laki.

Perbedaan upah buruh itu konsisten di setiap provinsi, dengan rasio upah perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang bervariasi, seperti di Banten dan Kalimantan Timur, buruh perempuan hanya menerima 62 persen dari upah buruh laki-laki, yang merupakan kondisi terburuk dibandingkan dengan provinsi lain.

Diskriminasi upah merupakan pembedaan upah buruh pada pekerjaan, kualifikasi, jam kerja, kinerja, serta kondisi lain yang semuanya sama. Jadi, pembedaan upah dilakukan semata-mata karena pertimbangan jenis kelamin ungkap Edy Prijono. Peraturan Menteri No.04/1988 juga menguatkan diskriminasi dengan membolehkan buruh perempuan untuk tidak mendapat tunjangan kesehatan apabila suaminya telah mendapat tunjangan dari perusahaan yang sama atau dari perusahaan lain (Sari 2004).

Fakta-fakta lain yang terjadi terhadap pendiskriminasi upah perempuan di Indonesia, dikemukakan oleh Ari Sunarijati (2007) pada diskusi "Perdagangan Perempuan dan Hak Bekerja" diselenggarakan oleh CEDAW *Working Group Initiative* (CWGI) pada tanggal 8 Februari 2007, sebagai berikut:

- a. Buruh/pekerja perempuan selalu dianggap berstatus lajang, meski telah berkeluarga mempunyai anak dan suaminya tidak memperoleh jaminan social apapun. Karena berstatus lajang maka buruh/pekerja perempuan tidak mendapat tunjangan keluarga maupun jaminan social bagi suami dan anak-anaknya. Padahal semua UU yang mengatur menyatakan non diskriminasi, ternyata masih sangat sulit diimplementasikan dalam kehidupan nyata.
- b. Potongan pajak penghasilan bagi buruh/pekerja perempuan lebih besar daripada laki-laki lantaran buruh perempuan bersatatus lajang, bukan kepala rumah tangga, walaupun pada kenyataannya suaminya sedang tidak bekerja.
- c. Jaminan Sosial, UU No. 3 tahun 1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 16 jelas mengatur "*Tenaga kerja, suami atau isteri, dan anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan*". Keluarga buruh/pekerja perempuan selalu miskin karena peraturan-perundangan tidak jalan.

- d. Pengupahan, sampai batas Upah Minimum (UM) Regional/Propinsi/Kabupaten/Kota masih sama untuk pekerjaan yang sama nilainya antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau sudah lebih dari UM tersebut mulai perbedaan atas nama jabatan, tunjangan keluarga, dan alasan lainnya.
- e. Promosi jabatan, perempuan sangat sulit memperoleh promosi jabatan. Perempuan pada umumnya masuk kerja di sektor industri padat karya seperti perusahaan garmen, sepatu, rokok, elektronik. Sektor industri ini tidak memerlukan tenaga kerja yang profesional, namun cukup dengan ketekunan, lama kelamaan menjadi trampil. Sistem kerja hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan setiap hari selama bertahun-tahun. Para perempuan yang hanya berpendidikan SD dan bahkan buta huruf-pun dapat bekerja disitu.
- f. Training, selain pada saat masuk kerja tidak ada lagi training bagi buruh/pekerja perempuan, inipun utamanya diperusahaan tekstile pemintalan dan elektronik, di garmen tidak ada training.
- g. Usia kerja, para buruh perempuan yang sudah berusia 40 (empat puluh) tahun di usik terus oleh pihak pengusaha agar tidak tahan lagi bekerja kemudian mengundurkan diri dan diganti oleh tenaga kerja perempuan yang baru lulus sekolah baik SMP, SMU dan masih lajang.

2.3.3. Akses Pendidikan

Survei demografi di 40 negara (Bank Dunia 2001) memperlihatkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan ibu, makin rendah angka kematian bayi. Bahkan, menurut Bank Dunia (2000) bahwa seorang ibu yang menyelesaikan pendidikan dasar enam tahun akan menurunkan angka kematian bayi secara signifikan dibandingkan dengan para ibu yang tidak tamat sekolah dasar. Angka kematian bayi ini bahkan semakin rendah bila para ibu menyelesaikan pendidikan menengah tingkat pertama (Kompas 24 Mei 2004).

Penyediaan akses pendidikan dasar di Indonesia cukup baik, hal ini terlihat dari tingkat partisipasi pendidikan dasar mencapai 97% baik laki-laki dan perempuan, namun akses ini semakin berkurang untuk tingkat pendidikan lanjutan (Noerdin *et al* 2006). Menurut

Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2004 jumlah perempuan umur 10 tahun keatas yang belum atau tidak pernah sekolah dua kali jumlah laki-laki (11,56% : 5,43%).

Dari data ini terlihat, bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sulit bagi perempuan mengaksesnya. Laporan dari UNDP ini semakin relevan apabila kita melihat realitas kualitas Sumber Daya Manusia kaum perempuan Indonesia, khususnya di sektor pendidikan. Berdasarkan data yang ada di Sub-Direktorat Pendidikan Keaksaraan Direktorat Pendidikan Luar Sekolah - Depdiknas, tidak kurang ada 11.200.000 orang kaum perempuan di Indonesia yang tercatat masih menyandang buta aksara, di mana 9,7% dari angka tersebut adalah kaum perempuan yang berusia antara 10-45 tahun (Media Indonesia, 11 Juli 2005).

2.3.4. Beban Kerja Perempuan

Akibat pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, maka perempuan diwajibkan melakukan tugas-tugas domestik/rumah tangga (seperti: mencuci piring, mencuci pakaian, menjaga anak, membersihkan rumah). Sementara itu, laki-laki diwajibkan untuk mencari nafkah bagi keluarga (tugas-tugas publik). Tugas ini akan menjadi berat terjadi pada keluarga miskin yang harus mempertahankan kehidupan di kota. Perempuan-perempuan miskin tidak hanya melakukan tugas wajibnya di ranah domestik, tetapi juga mereka harus bekerja di ranah publik untuk menambah biaya kehidupan keluarganya.

Hal ini juga dikemukakan oleh Mead (1957) dalam Sajogjo (1983) bahwa beban berat masih pada keluarga tidak mampu, karena untuk semua pekerjaan harus dilakukannya sendiri. Menurut laporan Sari (2004) bahwa, untuk kerja penuh waktu pun (antara 35-74 jam/minggu) lebih banyak diterima oleh laki-laki (71,6%), dibanding perempuan (48%), dan mayoritas pekerja yang bekerja dengan jam kerja yang panjang (di atas 75 jam/minggu) juga perempuan (44%).

Tingginya jumlah perempuan yang bekerja dalam jam kerja yang panjang membuktikan bahwa perempuan harus bekerja lembur untuk menutupi/mengkompensasi upah rendah yang ia terima. Sementara, sedikitnya jumlah perempuan yang bekerja penuh waktu adalah akibat keharusannya untuk mengerjakan kerja rumah tangga pada saat yang bersamaan.